

## ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan salah satu acuan dalam beracara untuk menangani perkara-perkara hukum pidana. Tahap penyitaan barang bukti dilakukan oleh penyidik. Pengelolaan barang bukti merupakan bagian yang penting dalam rangkaian tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam mengungkap suatu kasus telah terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu keberadaan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik dan pengelolaan barang bukti tidak dapat dikesampingkan dari adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi reformasi pengelolaan barang bukti yang disita di Polres Garut dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam penerapan reformasi hukum dalam penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti serta dalam pengelolaan barang bukti di Polres Garut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode analisis data menggunakan normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi reformasi hukum dalam pengelolaan barang bukti di Polres Garut dalam prakteknya belum tersentuh reformasi hukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui tiga paket kebijakan yaitu budaya hukum, regulasi, dan penegak hukum, salah satunya yang menjadi prioritas memberantas pungutan liar dengan terbentuknya satgas saber pungli di Kabupaten Garut lamban dalam pelantikan struktur organisasi. hal itu dibuktikan dengan baru terbentuknya pada tanggal 16 januari 2017 dan Faktor penghambat implementasi reformasi hukum dalam pengelolaan barang bukti di Polres Garut yaitu tidak ada transparansi pengelolaan barang bukti, kurangnya SDM dalam pengelolaan barang bukti serta kesadaran hukum masyarakat kurang.

Kata Kunci : Reformasi, hukum, barang bukti

## ***ABSTRACT***

The Book of the Law of Criminal Procedure is a reference in the proceedings to deal with matters of criminal law. Confiscation phase of evidence conducted by investigators. Management of evidence is an important part in a stages that must be passed in uncovering a case that has been proven wether or not the occurrence of a crime. Therefore, the existence confiscation of evidence conducted by investigators and its management can not be excluded from the provisions of the legislation that governing criminal acts.

This research aims to determine the implementation of evidence management reforms confiscated in Garut police and the obstacles in the implementation of legal reforms in the investigator conducting the evidence confiscation and the management of evidence in Garut police.

The method used in this research is the socio-juridical and use descriptive research specifications. Data analysis using qualitative normative.

Based on the research, the implementation of legal reforms in the management of evidence in Garut police in practice has not been touched by the legal reforms as done as the government do through three policy packages, that is cultural laws, regulations, and law enforcement officers, one of them being priority is to fight against illegal charges by the establishment of illegal charge cleans task force in Garut sluggish in the inauguration of the organizational structure. It is proved by the new formation on January 16, 2017 and the obstacle factors of legal reforms implementation in the management of evidence in Garut police are no transparency in management of evidence, less human resources in the management of evidence and less legal awareness of the community.

Keywords: reform, law, evidence